

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU
JALAN PENDDIKAN NO.5 PUTUSSIBAU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2021-2026 yaitu "*Menuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT)*", dengan didukung beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera

direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 8 Oktober 2023

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. ABDULLAH SANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB IV PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD Tahun 2024, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, guna menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJP Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Keberadaan RKPD Tahun 2024 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024. RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan.

Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 juga memperhatikan RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka Renja-PD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah (RKA-PD) yang merupakan bahan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD). Oleh karena itu penyusunan Renja-PD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan dimaksud.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan sebagai pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama periode 1 (satu) tahunan yaitu Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
- b. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran alokasi anggaran kegiatan;
- g. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Anggaran Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95,25%, dan capaian sampai dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 (triwulan III) terealisasi sebesar 73,00% atau sebesar Rp.2.721.094.905,00 (*dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu sembilan tarus lima rupiah*) dari total anggaran dinas sebesar Rp.3.708.517.400,00 (*tiga milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah*).

Dari realisasi yang telah dicapai pada triwulan ke III tersebut, masih tersisa anggaran sebesar Rp. 987.422.495,00 (*sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) yang akan dilaksanakan dan dimaksimalkan pencapaiannya di triwulan ke IV.

Realisasi anggaran tersebut belum dapat menunjukkan capaian kinerja dinas yang realistis mengingat masih terdapat satu triwulan dalam tahun berjalan (tahun 2023) yang belum dapat terukur dan terevaluasi sampai dengan tersusunnya rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024.

Dalam rangka pemenuhan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada Tahun 2024, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan triwulan III Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tw-III Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 5 + 11		13 = 12/5x100%		14
2.24.01	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		100 %	2.457.356.800	100,00	3.939.041.302	100%	3.308.291.424	19%	637.589.452	30%	976.673.158	24%	781.703.207	0%		72%	2.395.965.817	100,72	6.335.007.119			
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26.024.000		26.024.000		27.997.700			66%	18.540.700	0%	-		66%	18.540.700	0,66	44.564.700				
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	8.334.200	100	8.334.200	100	8.334.200	0%	-	100%	8.334.200	0%	-	0%	100%	8.334.200	101,00	16.668.400				DINAS PERPUS-TA-KAAN DAN KEARSIPAN
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.509.400	100	3.509.400	100	4.709.500	0%	-	100%	4.709.500	0%	-	0%	100%	4.709.500	101,00	8.218.900				
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	3.502.800	100	3.502.800	100	1.321.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	100,00	3.502.800				

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 6 + 12		13 = 13/5x100%	14	
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	3.630.800	100	3.630.800	100	5.497.000	0%	-	100%	5.497.000	0%	-	0%	-	100%	5.497.000	101,00	9.127.800		
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	3.324.000	100	3.324.000	100	2.604.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	3.324.000		
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dok	1.987.000	100	1.987.000	100	2.714.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	1.987.000		
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dok	1.735.800	100	1.735.800	100	2.818.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	1.735.800		
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58	Dok	1.899.892.005		1.955.114.151	100	2.211.781.493		446.656.747	34%	747.596.231	22%	486.435.619			56%	1.680.688.597	0,56	3.635.802.748		
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14	Dok	1.888.382.205	100	1.939.747.151	100	2.055.320.493	22%	446.656.747	35%	714.056.231	20%	414.795.619	0%	-	77%	1.575.508.597	100,77	3.515.255.748		
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11	Dok	2.044.800	100	2.044.800	100	147.480.000	0%	-	23%	33.540.000	49%	71.640.000	0%	-	71%	105.180.000	100,71	107.224.800		
2.24.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	Dok	2.991.600	100	4.210.600	0	967.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	4.210.600		

DINAS
PERPUS
TA-KAAN
DAN
KEARSIP
AN

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 6 + 12		13 = 13/5x100 %	14	
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	2.696.800	100	4.321.000	0	4.823.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	4.321.000		
	Pengelolaan dan Pengadaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan atas LHP	100	%	-	100	-														-		
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Dok	3.776.600	100	4.790.600	100	3.191.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	100,00	4.790.600			DINAS PERPUS TA-KAAN DAN KEARSIPAN
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	Dok	1.891.000		1.891.000		2.574.000		0%	-	-		0%	-	-				1.891.000		
2.24.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dok	898.000	100	898.000	100	988.000	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	898.000		
2.24.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dok	993.000	100	993.000	100	1.586.000	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	993.000		
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	Dok	22.428.800		31.570.102		22.051.000		-	0%	-	-		0%	-	-			31.570.102		

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 6 + 12		13 = 13/5x100 %	14	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Jasa tenaga administrasi	100	%																			
2.24.01.2.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepeawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dok	1.043.800	100	1.043.800	100	795.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	1.043.800		
2.24.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dok	1.031.000	100	1.031.000	100	902.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	1.031.000		
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Org	20.354.000	100	29.495.302	100	20.354.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	29.495.302		
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	16	Dok	398.899.995	100	404.039.966		424.042.535	17%	73.274.805	18%	75.430.140	37%	156.818.600		72%	305.523.545	100,72	709.563.511			
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Dok	3.014.000	100	3.312.000	100	7.015.000	0%	-	0%	-	28%	1.950.000	0%	28%	1.950.000	100,28	5.262.000			
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Dok	3.207.400	100	34.799.000	100	161.509.535	0%	-	0%	-	63%	101.165.000	0%	63%	101.165.000	100,63	135.964.000			
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Dok	1.800.000	100	1.047.000	100	27.127.500	0%	-	3%	845.000	23%	6.143.400	0%	26%	6.988.400	100,26	8.035.400			
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Dok	39.695.695	100	19.664.000	100	1.790.000	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00	19.664.000			

DINAS PERPUS TAKAAN DAN KEAR-SIPAN

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 6 + 12		13 = 13/5x100 %	14	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Dok	7.308.900	100	3.118.000	100	10.541.500	6%	580.000	0%	-	0%	-	0%	-	6%	580.000	100,06	3.698.000		
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dok	4.620.000	100	4.000.000	100	7.200.000	0%	-	20%	1.410.000	0%	-	0%	-	20%	1.410.000	100,20	5.410.000		
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Dok	3.000.000	100	6.000.000	100	14.840.000	0%		28%	4.200.000	72%	10.640.000	0%	-	100%	14.840.000	101,00	20.840.000		
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Dok	336.254.000	100	332.099.966	100	194.019.000	37%	72.694.805	36%	68.975.140	19%	36.920.200	0%	-	92%	178.590.145	100,92	510.690.111		
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Dok	22.321.000	100	276.791.967	100	501.654.696	0%	114.108.900	26%	129.889.087	0%	122.138.988	0%	-	26%	366.136.975	100,26	642.928.942		
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Dok	1.200.000	100	1.200.000	100	1.200.000	58%	700.000	42%	500.000	0%	-	0%	-	100%	1.200.000	101,00	2.400.000		
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Dok	4.216.000	100	41.980.679	100	80.148.696	14%	11.482.400	25%	20.412.587	19%	14.962.488	0%	-	58%	46.857.475	100,58	88.838.154		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin/berkala	100	%	2.500.000	100	-														-		
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Dok	14.405.000	100	38.974.500	100	420.306.000	24%	101.926.500	26%	108.976.500	25%	107.176.500	0%	-	76%	318.079.500	100,76	357.054.000		

DINAS
PERPUS
TA-KAAN
DAN
KEARSIP
AN

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 6 + 12		13 = 13/5x100 %	14	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	Dok	85.900.000	100	52.618.994	100	118.190.000	3%	3.549.000	4%	5.217.000	14%	16.310.000	0%	21%	25.076.000	100,21	77.694.994			
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Dok	61.950.000	100	52.618.994	100	94.240.000	4%	3.549.000	6%	5.217.000	14%	13.230.000	0%	-	23%	21.996.000	100,23	74.614.994		
2.24.01.2.09.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Dok	23.950.000	100	-	100	23.950.000	0%	-	0%	-	13%	3.080.000	0%	-	13%	3.080.000	100,13	3.080.000		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100	%	210.327.122	100	39.337.600	100	270.499.976	11%	29.456.300	55%	148.948.828	13%	35.023.300	0%	-	79%	213.428.428	100,79	252.766.028		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah	1	Laporan	113.317.900	100	23.993.600		166.581.476		900.000		133.962.128		12.111.900	0%	-	0%	146.974.028	100,00	170.967.628		
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8	Perpustakaan	25.000.000	100		100	149.824.976	0%		88%	132.162.128	7%	10.511.900	0%		95%	142.674.028	100,95	142.674.028		

DINAS PERPUS
TA-KAAN
DAN
KEARSIP
AN

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 6 + 12		13 = 13/5x100 %	14	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	29	Perpustakaan	88.317.900	100	23.993.600	100	16.756.500	5%	900.000	11%	1.800.000	10%	1.600.000	0%	-	26%	4.300.000	100,26	28.293.600		
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan Buku-Buku Perpustakaan (Penyampulan Buku)	100	%	70.000.000	100	5.172.300																
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat gemar membaca di masyarakat	38,4	%	97.009.222	100	15.344.000	100	103.918.500	27%	28.556.300	14%	14.986.700	22%	22.911.400	0%	-	64%	66.454.400	100,64	81.798.400		
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20	Lokus	63.942.200	100	15.344.000	100	44.493.000	17%	7.650.000	14%	6.150.000	19%	8.300.000	0%	-	50%	22.100.000	100,50	37.444.000		
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	Titik	33.067.022	100	-	100	59.425.500	35%	20.906.300	15%	8.836.700	25%	14.611.400	0%		75%	44.354.400	100,75	44.354.400		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100	%	97.000.000	100	130.861.930	100	90.976.000	35%	32.272.700	37%	33.579.660	13%	11.904.200	0%	-	85%	77.756.560	100,85	208.618.490		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi terkelolanya arsip dinamis	82	%	45.000.000	100	39.335.000	100	22.496.000	73%	16.516.000	9%	2.100.000	11%	2.400.000	0%	-	93%	21.016.000	100,93	60.351.000		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tesedianya Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Kapuas Hulu	100	%		100																	

DINAS
PERPUS
TA-KAAN
DAN
KEARSIP
AN

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 6 + 12		13 = 13/5x100 %	14	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	1	OPD	45.000.000	100	39.335.000	100	22.496.000	73%	16.516.000	9%	2.100.000	11%	2.400.000	0%	-	93%	21.016.000	100,93	60.351.000		
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Khazanah Arsip Statis yang dikelola LKD	100	%	-	100	21.290.800																
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan	13	%	52.000.000	100	91.526.930	100	68.480.000	23%	15.756.700	46%	31.479.660	14%	9.504.200	0%	-	83%	56.740.560	100,83	148.267.490		
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	9	Institusi (Desa)	52.000.000	100	91.526.930	100	68.480.000	23%	15.756.700	46%	31.479.660	14%	9.504.200	0%	-	83%	56.740.560	100,83	148.267.490		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		100	%	38.750.000	100	25.344.000	100	38.750.000	75%	29.044.100	7%	2.650.000	6%	2.250.000	0%	-	88%	33.944.100	100,88	59.288.100		
2.24.03.2.01	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimusnahkan	100	%	38.750.000	100	25.344.000	100	38.750.000	75%	29.044.100	7%	2.650.000	6%	2.250.000	0%	-	88%	33.944.100	100,88	59.288.100		
2.24.03.2.02.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	200	Dok	38.750.000	100	25.344.000	100	38.750.000	75%	29.044.100	7%	2.650.000	6%	2.250.000	0%	-	88%	33.944.100	100,88	59.288.100		
			100	%	2.803.433.922	100	4.134.584.832	100	3.708.517.400	20%	728.362.552	31%	1.161.851.646	22%	830.880.707			73%	2.721.094.905	100,73	6.855.679.737		

DINAS
PERPUS
TA-KAAN
DAN
KEARSIP
AN

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Tabel 2.1, untuk urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara umum pencapaian kinerja tahun 2022 sudah cukup baik, hampir semua target capaian kinerja 100%, Dan untuk tahun 2023 belum dapat terukur secara realistis, dikarenakan penyusunan rencana kerja ini masih dalam tahun berjalan (tahun 2023) dan masih terdapat satu triwulan (triwulan IV) yang harus dioptimalkan pencapaian target kinerja dan realisasi anggarannya di tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi : membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pelaksana urusan pemerintah bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja maupun hal-hal yang menjadi kekuatan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
2. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;
4. Adanya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dan stake holder lainnya berkepastian dan transparan;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
6. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
7. Penyampaian pelaporan LHKPN dan LHKASN yang tertib;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Beberapa permasalahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut, diantaranya :

- 1) belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan dan perkantoran;
- 2) terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia;
- 3) terbatasnya tenaga teknis untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
- 4) belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat serta stake holder lainnya berkaitan dengan

pemenuhan pemanfaatan pelayanan perpustakaan, serta pemanfaatan arsip sebagai pemenuhan pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dan tanggungjawab setara dengan perangkat daerah lainnya, masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
URUSAN PERPUSTAKAAN											
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun			5.000 pengunjung	5.300 pengunjung	5.800 pengunjung	5.307 pengunjung	5.870 pengunjung	5.870 pengunjung	-	
2	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			7.466 judul	7.566 judul	7.666 judul	5,452 judul	5,452 judul	5.472 judul	-	
URUSAN KEARSIPAN											
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib/baku (OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan)			n/a	n/a	22,22% (6 OPD)	-	-	22,22% (6 OPD)	37,04% (6 OPD)	
2	Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI)			n/a	n/a	4 OPD	-	-	4 OPD	10 OPD	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang memuat memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program.

Penyusunan Renstra diselaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Disamping itu penyusunan Renstra juga diselaraskan dengan Renstra K/L yang dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) dan Arsip Nasional Republik (ANRI) dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kapuas Hulu khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Depo arsip sebagai ruangan penyimpanan arsip inaktif/statis belum tersedia. Dengan semakin bertambahnya volume arsip dari perangkat-perangkat daerah yang harus disimpan, sementara tidak tersedianya depo arsip menyebabkan arsip belum dapat dikelola secara optimal;
- b. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital masih sangat terbatas;
- c. Khasanah arsip statis masih terbatas;
- d. Penyelenggaraan kearsipan masih belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan;

- e. Dana pembangunan kearsipan daerah masih terbatas, saat ini masih terdapat perangkat daerah yang belum memiliki record center sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif;
- f. Formasi pejabat fungsional Arsiparis masih terbatas pada OPD Teknis Pengelola Arsip Daerah, serta tidak/belum tersedianya fungsional Arsiparis pada setiap OPD;
- g. Ruang layanan perpustakaan masih belum dilengkapi fasilitas ruang audio visual dan fasilitas yang ramah lanjut usia dan difabel serta ruang laktasi;
- h. Sarana publikasi yang masif agar perpustakaan milik daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu masih kurang;
- i. Koleksi naskah kuno yang ada di masyarakat belum teridentifikasi dengan baik;
- j. Penerapan pengelolaan perpustakaan berbasis digital masih sangat terbatas;
- k. Formasi pejabat fungsional Pustakawan masih terbatas pada perpustakaan daerah, masih belum menyeluruh pada perpustakaan sekolah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan, perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru;
3. Adanya perubahan peraturan tentang perubahan regulasi dan peraturan tentang perpustakaan dan kearsipan;
4. Adanya perubahan peraturan tentang penyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi pengurangan atau penambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2024.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023, dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Program dan Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.0)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu				294.920.413	Program Pembinaan Perpustakaan					10.699.300.600	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota)	Kab. Kapuas Hulu	Persentase perpustakaan yang aktif	3,41	%	169.341.900	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota)	Kab. Kapuas Hulu	Persentase perpustakaan yang aktif	2,79	%	107.590.100	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4	Perpustakaan	93.334.400	Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota						tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kab./Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan Sesuai Standar Perpustakaan	18	Perpustakaan	49.598.000	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kab./Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan Sesuai Standar Perpustakaan	18	Perpustakaan	23.993.600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibina dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1	Perpustakaan	10.000.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibina dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4	Perpustakaan	78.424.200	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Orang	10.000.000	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota						tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	916	Eksemplar	6.409.500	Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	916	Eksemplar	5.172.300	
2.23.02.2.02	Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	38,17	%	125.578.513	Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	38,17	%	10.591.710.500	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar/khusus serta Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20	Lokus	63.942.200	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar/khusus serta Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20	Lokus	15.352.000	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun/ dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	3.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun/ dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	10.527.466.500	Dialokasikan dari usulan DAK Bidang Perpustakaan
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	23	Orang	32.142.000	Pemberian Penghargaan gerakan budaya gemar membaca						tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran
2.23.02.2.02.04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	Perpustakaan	26.494.313	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	Perpustakaan	48.892.000	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.696.493.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.696.493.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Dokumen	26.024.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Dokumen	26.024.000	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8.334.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8.334.200	
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.509.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.509.400	
2.24.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.502.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.502.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.630.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.630.800	
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.324.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.324.000	
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	1.987.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	1.987.000	
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	1.735.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	1.735.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59	Dokumen	1.902.208.805	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59	Dokumen	1.902.208.805	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	1.888.382.205	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	1.888.382.205	
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11	Dokumen	2.044.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11	Dokumen	2.044.800	
2.24.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	Dokumen	2.991.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	Dokumen	2.991.600	
2.24.01.2.02.05	Koordinasidan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	2.696.800	Koordinasidan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	2.696.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	2.316.800	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	2.316.800	
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Dokumen	3.776.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Dokumen	3.776.600	
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	Dokumen	3.011.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	Dokumen	3.011.600	
2.24.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.120.600	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.120.600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	898.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	898.000	
2.24.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	993.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	993.000	
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13	Dokumen	749.578.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13	Dokumen	749.578.400	
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Dokumen	373.751.800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Dokumen	373.751.800	
2.24.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	373.751.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	373.751.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	1.043.800	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	1.043.800	
2.24.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	1.031.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	1.031.000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen administrasi Umum	18	Dokumen	414.604.595	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen administrasi Umum	18	Dokumen	414.604.595	
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	3.014.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	3.014.000	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	3.207.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	3.207.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Dokumen	1.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Dokumen	1.800.000	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	39.695.695	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	39.695.695	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Dokumen	10.541.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Dokumen	10.541.500	
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	4.620.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	4.620.000	
2.24.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	Dokumen	14.840.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	Dokumen	14.840.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Dokumen	336.254.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Dokumen	336.254.000	
2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	632.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	632.000	
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Dokumen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Dokumen	-	
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Dokumen	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Dokumen	-	
2.24.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Dokumen	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Dokumen	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	6	Dokumen	477.166.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	6	Dokumen	477.166.000	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Dokumen	1.200.000	Penyediaan Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Dokumen	1.200.000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Dokumen	42.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Dokumen	42.160.000	
2.24.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	5.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	5.100.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	428.706.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	428.706.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	Dokumen	123.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	Dokumen	123.900.000	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Dokumen	61.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Dokumen	61.950.000	
2.24.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Dokumen	61.950.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Dokumen	61.950.000	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip					241.757.000	Program Pengelolaan Arsip					196.170.930	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik	16	%	152.063.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik	16	%	47.310.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan arsip Dinamis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Institusi yang menciptakan dan menggunakan arsip dinamis	55	Institusi	92.230.000	Penciptaan dan Penggunaan arsip Dinamis						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen arsip dinamis yang terpelihara	16	Arsip Teksstual/ Non Teksstual	9.223.000	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	1	Perangkat Daerah	50.610.000	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	1	Perangkat Daerah	47.310.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase terkelolanya arsip statis	19	%	38.750.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase terkelolanya arsip statis	19	%	31.815.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah dan dipelihara	5	Berkas Arsip	38.750.000	Akuisisi Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah dan dipelihara	5	Berkas Arsip	31.815.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan	3	%	50.944.000	Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan	3	%	117.045.930	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kotra	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	9	Institusi (Desa)	50.944.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kotra	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	9	Institusi (Desa)	117.045.930	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					77.500.000	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					39.643.000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Kapuas Hulu	Persentase arsip Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimusnahkan	1,85	%	38.750.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					-	
2.24.03.2.02.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1	Berkas	38.750.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	7,41	%	38.750.000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	7,41	%	39.643.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi arsip Akibat Bencana	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Arsipnya Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemuliharaan Penyimpanan Akibat Bencana	2	Perangkat Daerah	38.750.000	Evakuasi dan Identifikasi arsip Akibat Bencana	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Arsipnya Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemuliharaan Penyimpanan Akibat Bencana	1	Perangkat Daerah	39.643.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja terkait penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan (tahun 2024) bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu saat ini tidak/ belum terdapat masukan program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perpustakaan dan kearsipan, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan penggabungan perangkat daerah yang didasarkan perumpunan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan. Dan secara kelembagaan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan memiliki instansi pembina tingkat nasional yaitu Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkedudukan di Ibukota Jakarta.

Oleh karena itu dalam melakukan telaahan selanjutnya diperlukan analisis terhadap 2 (dua) kategori urusan pemerintahan berkaitan dengan PERPUSNAS RI serta ANRI. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kapuas Hulu berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

3.2.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disperpusip	Sebagai Faktor	
			Penghambat (-)	Pendorong (+)
(1)	(2)	()	()	()
Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024				
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	Budaya kegemaran membaca masyarakat belum terdapat peningkatan yang signifikan	Daya tarik perpustakaan belum tinggi	Urusan Perpustakaan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai prioritas nasional sebagai bagian penting budaya literasi dalam indeks pembangunan kebudayaan
Renstra Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024				
1.	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan ditandai dengan meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat peraturan perundang-undangan bidang kearsipan	Ketersediaan dan keberadaan arsip autentik dan arsip bernilai kesejarahan belum efektif	Pengelolaan arsip dinamis belum tertib	Urusan Kearsipan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari agenda Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta agenda memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional ditandai dengan meningkatnya ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan		Penyelamatan Arsip kesejarahan belum efektif	
3.	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan arsip informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan	Kualitas pelayanan informasi kearsipan belum memadai	Fasilitas penunjang dan SDM pengelola masih belum optimal	Tersedianya sistem informasi dan implementasi aplikasi SRIKANDI

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Meningkatnya nilai budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Terwujudnya Perpustakaan yang berstandar Nasional sebagai wahana belajar sepanjang hayat 3. Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> A. Program Pengembangan Perpustakaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional; B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional C. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional
2	Meningkatnya pelestarian khasanah intelektual budaya bangsa untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa 	

Selanjutnya berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.3. yaitu :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ANRI 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan 2. Meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional 3. Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang prima 4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI 	<ol style="list-style-type: none"> A. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional B. Program Dukungan Manajemen;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka

akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu adalah mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan status kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Tujuan Renja 2024 adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan yaitu tahun 2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah.

Sasaran atau Objek Organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

Fokus utama penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan **Sasaran**, tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target capaian kinerja sebesar 59,03%;
 - Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat, dengan target 2,30%.
2. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, indikator sasaran Predikat SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan target capaian kinerja B.
3. Meningkatnya pengelolaan dan layanan administrasi kearsipan yang baik, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan dengan target dengan target capaian kinerja 16 OPD ;
 - Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI) dengan target capaian kinerja sebesar 53,70%.

Perumusan tujuan dan sasaran renja digunakan dalam penyusunan rencana strategis tahunan perangkat daerah, sekaligus merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan selama 1 (satu) tahun. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 beserta indikatornya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
2	Mewujudkan Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal	Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	59,03
			Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat	%	2,30
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat	B
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan administrasi kearsipan yang baik	Jumlah OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan	OPD	16
			Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI)	%	53,70

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 4 Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, maka program dan kegiatan yang disusulkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya, serta sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Adapun Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip;
4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2024, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 4 (empat) program dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

a) *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c) *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan :

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d) *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, terdiri sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, terdiri sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

2. Program Pengelolaan Arsip

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan administrasi kearsipan secara handal dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga lebih mudah, murah dan praktis serta lebih akurat, cepat dan tepat dalam pengelolaan administrasi kearsipan, program ini dalam pelaksanaannya sekaligus melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan kepada semua institusi untuk mewujudkan pengelolaan tertib administrasi kearsipan, program

pengelolaan arsip ini kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a) *Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota;
- b) *Kegiatan Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota*, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kotra.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan penyelamatan arsip sehingga tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dapat dipenuhi, program pengelolaan arsip ini kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a) *Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Daerah Kecamatan.

4. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan tata Kelola dan pelayanan perpustakaan melalui upaya pembinaan dan pemanfaatan fasilitas dan prasarana yang tersedia menuju transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, program Pembinaan Perpustakaan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a) *Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota)*, terdiri sub kegiatan :
- 1) Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kab./Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan;
- a) *Kegiatan Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*, terdiri sub kegiatan :
- 1) Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar/khusus serta Masyarakat;
 - 2) Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG-KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3.489.681.831,00				4.416.633.897,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.489.681.831,00				4.416.633.897,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			112.300.000,00				309.035.497,00	
2/23/02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	112.300.000,00				309.035.497,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah lokus/perpustakaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Perpustakaan	46.800.000,00				212.229.751,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>	6 Perpustakaan	22.400.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		142.491.851,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	24 Perpustakaan	24.400.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		69.737.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lokus/perpustakaan Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	22 Lokus (Perpustakaan)	65.500.000,00				96.805.746,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	<i>Jumlah Lokus/perpustakaan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan</i>	20 Lokus (Perpustakaan)	12.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		63.942.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	<i>Jumlah lokus/ Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>	2 Perpustakaan	53.500.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		32.863.546,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			3.377.381.831,00				4.107.598.400,00	
2/23/01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.278.831.831,00				3.953.654.400,00	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	3.950.000,00				26.024.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	600.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		8.334.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	675.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		3.509.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	650.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		3.502.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	450.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		3.630.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	700.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		3.324.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	500.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		1.987.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	375.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		1.735.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	35 Dokumen	2.051.793.139,00				2.039.283.605,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan/Daftar Gaji ASN	14 Dokumenmen	1.904.913.139,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		1.888.382.205,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	145.080.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		145.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.050.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		2.044.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	750.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		3.776.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	750.000,00				1.891.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen Laporan	375.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		898.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen Laporan	375.000,00	Kab. Kapuas Hul	DANA ALOKASI UMUM		993.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18 Dokumen	119.111.000,00				446.826.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen (1 Paket)	17.550.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		373.751.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	475.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		1.043.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	550.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		1.031.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 dokumen (2 Orang)	100.536.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		71.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	51 Dokumen	460.622.500,00				474.617.195,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Dokumen	2.595.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		3.014.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2	3	4	7	10	11	12	13	14
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Dokumen	29.013.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		78.692.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		1.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Dokumen	34.710.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		39.695.695,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	18.842.500,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		10.541.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		4.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Dokumen Laporan	370.862.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		336.254.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 Dokumen	526.058.842,00				477.166.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen Laporan	4.200.000,00	Kab. Kapuas ulu	DANA ALOKASI UMUM		1.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Dokumen Laporan	72.314.114,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		42.160.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	449.544.728,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		428.706.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	116.546.350,00				416.846.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		61.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Dokumen	109.546.350,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		354.896.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2	3	4	6	10	11	12	13	14
2/24/02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	62.700.000,00				115.944.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen Laporan	24.600.000,00				65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen Laporan	24.600.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pember-dayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Ke-arsipan Daerah Kabupaten/ Kota	9 Dokumen Laporan	38.100.000,00				50.944.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pember-dayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Ke-arsipan Daerah Kabupaten/ Kota	9 Dokumen Laporan	38.100.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		50.944.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2/24/03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	35.850.000,00				38.000.000,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	3 Daftar	35.850.000,00				38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	3 Daftar	35.850.000,00	Kab. Kapuas Hulu	DANA ALOKASI UMUM		38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
JUMLAH				3.489.681.831,00				4.416.633.897,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan semestinya dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam bentuk dokumen Renja tersebut agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 memuat program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.
4. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, transparansi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun catatan penting yang menjadi saran bagi perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya adalah :

1. Agar lebih teliti didalam mengumpulkan dan menginput data monitoring kinerja, agar tidak terjadi kesalahan, serta menjaga sesuaian data kinerja.
2. Melengkapi data pendukung dalam melaksanakan evaluasi kinerja seperti undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat.
3. Seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu agar meningkatkan integritas, disiplin dan profesionalisme kerja, serta menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja dan standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya pemenuhan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan minimal, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja yang lebih bertanggungjawab.